



Menakar Arah Baru Pertahanan Indonesia: Studi Kasus Kemitraan Militer Indonesia–Turki di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo

Muhammad Nasir

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Indonesia

Korespondensi penulis : Muhnasir1302@gmail.com*

Abstract. *This research evaluates the direction of Indonesia's defense policy under the leadership of President Prabowo Subianto, taking the Indonesia-Turkey strategic partnership as the main case study. Using a qualitative approach with an instrumental case study method, this research analyzes the dynamics of military cooperation that includes key projects such as the development of the Bayraktar drone, involvement in the KAAN fifth-generation fighter jet, and collaborative submarine construction plans. The results show that these partnerships represent a strategy of defense equipment diversification and strengthening the domestic defense industry, and reflect a shift in Indonesia's strategic orientation from dependence on Western countries towards a more balanced partnership with the Global South. The findings confirm that Prabowo's defense policy shows continuity from the previous period, but also brings innovation through a more pragmatic, independent and responsive approach to regional and global security challenges.*

Keywords: *Defense Policy, Prabowo, Indonesia-Turkey, Defense Equipment, Military Diplomacy.*

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi arah kebijakan pertahanan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan menjadikan kemitraan strategis Indonesia–Turki sebagai studi kasus utama. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental, penelitian ini menganalisis dinamika kerja sama militer yang mencakup proyek-proyek utama seperti pengembangan drone Bayraktar, keterlibatan dalam jet tempur generasi kelima KAAN, dan rencana kolaborasi pembangunan kapal selam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan ini merepresentasikan strategi diversifikasi alutsista dan penguatan industri pertahanan domestik, serta mencerminkan pergeseran orientasi strategis Indonesia dari ketergantungan pada negara-negara Barat menuju kemitraan yang lebih seimbang dengan negara Global Selatan. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pertahanan era Prabowo menunjukkan kesinambungan dari periode sebelumnya, namun juga membawa inovasi melalui pendekatan yang lebih pragmatis, mandiri, dan responsif terhadap tantangan keamanan regional dan global.

Kata kunci: Kebijakan Pertahanan, Prabowo, Indonesia–Turki, Alutsista, Diplomasi Militer.

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan prabowo subianto sebagai presiden republik indonesia pada tahun 2024 menandai titik balik dalam kebijakan pertahanan dan politik luar negeri indonesia. Sebagai mantan panglima komando cadangan strategis angkatan darat dan menteri pertahanan era presiden joko widodo, prabowo dikenal memiliki pendekatan yang tegas dalam isu-isu strategis dan pertahanan nasional. Dalam masa transisi kepemimpinan ini, perhatian publik dan akademisi tertuju pada arah baru pertahanan indonesia, khususnya dalam membangun kemitraan strategis dengan negara-negara non-tradisional seperti turki. Hal ini ditandai dengan sejumlah perjanjian dan proyek kolaboratif militer antara indonesia dan turki yang meningkat signifikan sejak awal 2025.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemetaan terhadap transformasi kebijakan pertahanan indonesia dalam konteks geopolitik global yang semakin kompleks. kemitraan

militer dengan turki, seperti pengembangan bersama sistem pertahanan udara dan rencana pembukaan fasilitas industri pertahanan turki di indonesia, menunjukkan pergeseran strategis dari ketergantungan pada negara barat ke mitra selatan-global yang lebih setara dan dinamis (athirah, 2025). langkah ini menunjukkan kecenderungan indonesia memperluas portofolio kerjasama militernya guna memperkuat otonomi strategis dan modernisasi alutsista nasional.

Konteks global juga mendukung pentingnya analisis ini. dalam dunia pasca-pandemi dan perang ukraina, banyak negara berkembang mulai merevisi arsitektur pertahanan mereka untuk memperkuat daya tangkal secara mandiri. indonesia pun tampaknya mengadopsi kebijakan serupa melalui pendekatan yang lebih pragmatis terhadap teknologi dan kemitraan militer. turki, sebagai negara nato dengan pengalaman industri pertahanan yang maju namun juga sering berseberangan dengan barat, menjadi mitra strategis yang menarik (Robby & Boran, 2024).

Namun demikian, permasalahan utama yang muncul adalah minimnya kajian akademik yang menganalisis secara komprehensif arah kebijakan pertahanan indonesia di bawah kepemimpinan prabowo, khususnya dalam kerangka kerjasama militer indonesia–turki. mayoritas studi masih berfokus pada aspek elektoral dan populisme prabowo (yilmaz et al., 2024), sementara dimensi kebijakan luar negeri dan pertahanan relatif kurang mendapatkan sorotan. Di sisi lain, publikasi kebijakan resmi yang dikeluarkan pemerintah masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci tujuan strategis jangka panjang dari kemitraan ini.

Kesenjangan literatur inilah yang ingin dijembatani oleh penelitian ini. studi ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan pertahanan indonesia di bawah presiden prabowo dengan menjadikan kemitraan indonesia–turki sebagai studi kasus utama. Penelitian ini tidak hanya menyoroti motivasi politik dan strategi militer di balik kemitraan ini, namun juga mencoba menilai dampaknya terhadap posisi indonesia di kawasan indo-pasifik serta dinamika kekuatan regional. Secara teoretis, jurnal ini akan berkontribusi pada pengembangan studi hubungan internasional dan kebijakan pertahanan negara berkembang, khususnya terkait dengan strategi diversifikasi kemitraan militer. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan bagi para pengambil keputusan di bidang pertahanan, diplomasi, dan industri strategis, sekaligus menambah pemahaman publik mengenai arah kebijakan luar negeri indonesia ke depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan pertahanan Indonesia melalui analisis kemitraan militer strategis Indonesia–Turki di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali fenomena kompleks dalam konteks geopolitik dan hubungan internasional yang melibatkan banyak dimensi kebijakan, aktor negara, serta dinamika global yang sedang berlangsung (Creswell & Poth, 2018).

Jenis studi kasus yang digunakan adalah studi kasus instrumental (instrumental case study), di mana kemitraan Indonesia–Turki dijadikan sebagai sarana untuk memahami arah kebijakan pertahanan Indonesia secara lebih luas. Studi kasus ini bersifat eksploratif dan interpretatif, dengan fokus pada makna, strategi, dan proses kebijakan, bukan sekadar hasil atau output militer. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan fenomena berdasarkan data empiris dan menganalisisnya dalam kerangka teori hubungan internasional dan keamanan nasional.

Prosedur analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi tematik (thematic content analysis) yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Langkah-langkah analisis meliputi: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan intensif, (2) pengkodean data secara terbuka berdasarkan tema yang muncul, (3) identifikasi pola-pola strategis, diplomatis, dan militer dari kemitraan yang dianalisis, (4) pemaknaan tematik dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia, dan (5) penyimpulan serta refleksi teoretis terhadap kebijakan pertahanan nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kepemimpinan Prabowo Subianto

Prabowo Subianto dikenal sebagai pemimpin dengan latar belakang militer yang kuat, yang membentuk karakter kepemimpinannya menjadi tegas, disiplin, dan berorientasi pada efisiensi serta ketertiban. Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 di Jakarta. Ia besar dalam keluarga yang memiliki pengaruh besar di bidang politik dan ekonomi. Ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, adalah seorang ekonom terkemuka dan salah satu perumus kebijakan ekonomi Indonesia di masa awal kemerdekaan. Dari keluarganya inilah, Prabowo mendapatkan landasan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air yang kuat. Karier Prabowo di militer membawanya menduduki berbagai posisi penting, termasuk sebagai Komandan Jenderal Kopassus, pasukan elit TNI AD. Dedikasi dan kepemimpinannya di militer

menjadikannya tokoh yang dihormati, meskipun kontroversi tetap mewarnai perjalanan kariernya. Setelah pensiun dari militer, Prabowo memasuki dunia politik dan mendirikan Partai Gerindra pada 2008, sebuah langkah strategis yang menjadikan dirinya sebagai salah satu kekuatan besar dalam politik nasional. Setelah beberapa kali maju sebagai calon presiden, ia akhirnya berhasil memenangkan pemilihan pada 2024. Sebelum menjadi presiden, Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada era Presiden Joko Widodo. Selama menjabat, ia membawa perubahan signifikan dalam penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan meningkatkan kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat. Salah satu pencapaian besarnya adalah penguatan pertahanan maritim, yang menjadi perhatian penting mengingat posisi strategis Indonesia di tengah jalur perdagangan dunia. Prabowo juga berhasil memperkokoh Partai Gerindra sebagai kekuatan politik nasional, menjadikannya salah satu partai terbesar di Indonesia. Dalam berbagai pidato kampanyenya, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional. Ia memperjuangkan pengembangan industri dalam negeri, pertanian, dan sektor maritim yang kuat sebagai jalan menuju kemakmuran bangsa (Mardika, 2024).

Sebagai pemimpin dengan latar belakang militer, Prabowo sering kali diidentikkan dengan pendekatan tegas dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam beberapa kesempatan, ia secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan untuk menciptakan pemerintahan yang militeristik. Pada saat retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, sebuah pernyataan yang menarik adalah saat Prabowo menyampaikan kepada para anggota kabinetnya, "Saya bukan bermaksud membuat Anda militeristik!" (Yanwardhana, 2024). Gaya kepemimpinan ini tercermin dalam upayanya membangun sinergi kabinet melalui pendekatan "the military way" yang menekankan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa, namun tetap menegaskan bahwa pemerintahannya tidak semata-mata militeristik.

berbagai kesempatan, Prabowo menekankan bahwa tujuan utamanya adalah memperkuat kekuasaan negara dan menjamin kedaulatan nasional, bukan mengedepankan pendekatan otoriter. Pendekatan karismatik dan kemampuan memobilisasi dukungan publik juga menjadi ciri khasnya, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif sosiologi politik Max Weber, yang menempatkan Prabowo sebagai pemimpin karismatik yang mampu mengarahkan birokrasi dan kebijakan¹.

Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019, Prabowo membawa sejumlah terobosan kebijakan strategis, di antaranya penguatan konsep pertahanan rakyat semesta, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), pengembangan industri pertahanan nasional,

serta diplomasi pertahanan yang aktif dan bebas dari tekanan pemasok tunggal([sucipto,2024](#)). Ia memperjuangkan efisiensi belanja alutsista, memastikan pembelian peralatan sesuai kebutuhan nasional, dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara produsen demi alih teknologi dan kemandirian industri pertahanan. Saat menjabat Presiden, Prabowo semakin menegaskan pentingnya kekuatan pertahanan sebagai syarat mutlak perlindungan negara dan rakyat, serta memperluas peran TNI dalam ketahanan pangan dan diplomasi militer ([setneg.go.id, 2025](#)). Visi pertahanan nasional di bawah Prabowo pasca 2024 mengalami reorientasi signifikan, dengan penekanan pada kekuatan militer yang modern, profesional, dan responsif terhadap ancaman baru, baik militer, non-militer, maupun hibrida. Prabowo menegaskan bahwa perlindungan negara tidak cukup hanya dengan niat baik atau teori, melainkan harus didukung kekuatan nyata. Ia juga menekankan pentingnya diplomasi militer, kerja sama regional, dan penguatan operasi keamanan perbatasan untuk menjaga stabilitas nasional serta memperkuat posisi Indonesia di kawasan.

Dinamika Kemitraan Militer Indonesia–Turki

Kerja sama militer antara Indonesia dan Turki telah mengalami transformasi signifikan dari hubungan bilateral biasa menjadi kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Sejak awal dekade 2010-an, kedua negara secara konsisten memperkuat kolaborasi dalam bidang pertahanan melalui transfer teknologi, produksi bersama, dan peningkatan kapasitas industri pertahanan domestik. Dinamika geopolitik global serta kebutuhan Indonesia untuk memperkuat otonomi pertahanannya telah mendorong kedua negara untuk memperdalam kerja sama secara lebih konkret. Turki, dengan pengalamannya sebagai anggota NATO yang juga aktif mengembangkan industri pertahanan mandiri, menjadi mitra ideal bagi Indonesia dalam mengejar kemandirian alutsista dan penguatan kapasitas teknologi militer.



Gambar 1. Agenda Pertemuan Indonesia-Turki

Kemitraan militer Indonesia dan Turki telah memasuki fase strategis dengan sejumlah inisiatif terkini yang mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperdalam kolaborasi pertahanan. Berikut analisis perkembangan dan agenda strategis berdasarkan data terbaru:

Joint Venture Produksi Drone dan Penguatan Rantai Pasok lokal

Pada Februari 2025, Indonesia dan Turki menandatangani kesepakatan pembentukan joint venture antara Republikorp (Indonesia) dan Baykar (Turki) untuk membangun pabrik drone di Indonesia (Sawiyya, 2025). Pabrik ini akan memproduksi dua jenis pesawat nirawak (UAV) canggih: Bayraktar TB3 (tipe MALE-Medium Altitude Long Endurance) yang mampu beroperasi dari kapal induk, dan Bayraktar Akinci (tipe HALE-High Altitude Long Endurance) dengan jangkauan dan daya hancur tinggi. Kolaborasi ini tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga mencakup transfer teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan

rantai pasok lokal untuk mengurangi ketergantungan impor komponen. Menurut Norman Joesoef, pendiri Republikorp, kemitraan ini bertujuan menempatkan Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok global industri drone, sekaligus memperkuat kapasitas pertahanan nasional (Wahyu, 2025).

Partisipasi dalam Pengembangan Jet Tempur Generasi Kelima KAAN Pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Turki pada April 2025, Indonesia menyatakan minatnya untuk bergabung dalam proyek pengembangan jet tempur generasi kelima TAI KAAN ([cnnindonesia, 2025](#)). Jet tempur buatan Turkish Aerospace Industries (TAI) ini dirancang sebagai pesawat siluman multirole dengan kemampuan pertempuran udara-ke-udara dan udara-ke-darat. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Prabowo menegaskan keinginan Indonesia untuk terlibat dalam joint development KAAN, termasuk pembentukan perusahaan patungan di sektor pertahanan. Langkah ini tidak hanya memberi akses teknologi canggih bagi Indonesia, tetapi juga membuka peluang partisipasi industri lokal dalam produksi komponen dan sistem avionik ([Indonesian-aerospace, 2025](#)). Proyek KAAN diprediksi memasuki fase produksi massal pada 2028–2029, dengan Indonesia berpotensi menjadi mitra strategis di kawasan Asia Tenggara ([tempo, 2025](#)).

Kolaborasi Pengembangan Kapal Selam dan Transfer Teknologi Selain drone dan jet tempur, Indonesia juga menjajaki kerja sama dengan Turki dalam pengembangan kapal selam ([cnnindonesia, 2025](#)). Meskipun detail proyek belum diungkapkan secara resmi, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kolaborasi ini mencakup dukungan teknis dan transfer teknologi dari industri pertahanan Turki, termasuk potensi pengembangan kapal selam bertenaga konvensional maupun nuklir ([Purnama, 2025](#)). Langkah ini sejalan dengan upaya Indonesia memperkuat armada lautnya, terutama di tengah dinamika keamanan maritim di Laut China Selatan dan Selat Malaka. Namun, implementasi proyek masih dalam tahap pembahasan awal, dengan kemungkinan melibatkan perusahaan seperti Roketsan atau STM dalam alih teknologi sistem persenjataan.

Kemitraan Indonesia-Turki dalam bidang pertahanan mencerminkan strategi diversifikasi sumber alutsista dan penguatan industri pertahanan domestik. Dengan memprioritaskan transfer teknologi melalui skema joint venture, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada pemasok tradisional seperti Amerika Serikat atau Rusia. Di sisi lain, Turki mendapatkan akses pasar di Asia Tenggara sekaligus memperluas pengaruh geopolitiknya melalui diplomasi pertahanan. Kolaborasi ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai hub industri pertahanan regional, khususnya dalam produksi drone dan sistem

rudal(Anggrainy, 2025). Namun, tantangan utama terletak pada konsistensi pendanaan, kapasitas absorpsi teknologi, dan koordinasi antarlembaga di tingkat nasional.

Analisis Strategi Kebijakan Pertahanan Indonesia: Kontinuitas Atau Perubahan?

Kebijakan Pertahanan Indonesia di era presiden jokowi

Dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), strategi kebijakan pertahanan Indonesia menunjukkan adanya kontinuitas dari visi strategis sebelumnya, namun dengan penekanan kuat pada transformasi postur pertahanan ke arah maritim dan regional. Hal ini tercermin dalam konsep Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia” yang menjadi pusat dari kebijakan pertahanan nasional sejak awal masa jabatannya. Kebijakan ini tidak hanya merupakan respons terhadap dinamika geopolitik kawasan, tetapi juga didasarkan pada kebutuhan internal Indonesia untuk memperkuat kedaulatan teritorial, khususnya di wilayah laut yang selama ini kurang termanfaatkan secara maksimal (Midhio et al., 2020).

Salah satu bentuk nyata dari kebijakan pertahanan era Jokowi adalah upaya sistematis dalam memperkuat Angkatan Laut dan pengawasan maritim. Strategi ini dilakukan melalui modernisasi alutsista (alat utama sistem senjata), pengembangan pangkalan militer di wilayah timur Indonesia, serta penguatan kerja sama pertahanan dengan negara-negara Indo-Pasifik seperti Jepang, India, dan Australia. Pendekatan ini secara nyata menunjukkan pergeseran fokus dari pertahanan berbasis darat ke pertahanan berbasis maritim yang lebih responsif terhadap ancaman lintas batas dan konflik kawasan (Prakoso & Sianturi, 2021).

Namun demikian, kebijakan pertahanan pada masa Jokowi juga memperlihatkan kesinambungan dalam struktur dan kerangka kerja dari pemerintahan sebelumnya, termasuk tetap mengacu pada Doktrin Pertahanan Negara dan Buku Putih Pertahanan sebagai pedoman utama. Akan tetapi, Jokowi memperkuat implementasi melalui pendekatan integratif dan pragmatis, seperti terlihat dalam penyatuan koordinasi antar-instansi militer dan sipil dalam operasi keamanan maritim, terutama dalam menanggapi isu seperti illegal fishing dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing (Hardianto, 2021).

Tantangan utama yang dihadapi kebijakan pertahanan Jokowi adalah keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada pengadaan senjata dari luar negeri. Walaupun Jokowi berupaya mendorong kemandirian industri pertahanan nasional melalui revitalisasi BUMN pertahanan seperti PT PAL dan PT Pindad, hasilnya belum optimal. Selain itu, pengaruh politik luar negeri dan tekanan dari kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan Laut China Selatan menambah kompleksitas implementasi strategi pertahanan nasional (Susetyo & Sarjito, 2022). Secara normatif, kebijakan pertahanan Jokowi juga mengalami

perluasan dari segi diplomasi pertahanan. Konsep defense diplomacy aktif diterapkan untuk menjaga kestabilan kawasan, termasuk melalui latihan militer gabungan dan forum multilateral seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM). Strategi ini bertujuan bukan hanya pada kekuatan militer, tetapi juga membangun persepsi positif dan kepercayaan antarnegara terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian kawasan (Adikara & Munandar, 2021).

Secara umum, strategi kebijakan pertahanan era Presiden Jokowi dapat dikategorikan sebagai sebuah evolusi daripada revolusi. Ada kesinambungan dalam dasar-dasar ideologis dan institusional, tetapi terjadi perubahan substansial dalam orientasi strategis, pendekatan operasional, serta ekspansi kerja sama internasional yang lebih agresif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan di era Jokowi merupakan campuran antara kontinuitas dan inovasi, yang bertujuan menjawab tantangan zaman secara adaptif dan proaktif (Hikam & Praditya, 2015).

Kebijakan Pertahanan Indonesia di era presiden prabowo

Kebijakan pertahanan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam dinamika pertahanan nasional, yang secara jelas memperlihatkan kesinambungan (kontinuitas) dari fondasi kebijakan era sebelumnya, namun juga membawa sejumlah perubahan (perubahan) yang signifikan. Prabowo, yang telah berpengalaman sebagai Menteri Pertahanan pada periode sebelumnya, membawa visi yang tegas bahwa kekuatan pertahanan adalah prasyarat utama bagi kedaulatan dan keutuhan negara. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden, Prabowo secara eksplisit menyatakan bahwa pertahanan tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kekuatan nyata yang terorganisir dan modern, mengingat ancaman terhadap Indonesia semakin kompleks dan multidimensi, mulai dari ancaman konvensional hingga non-konvensional seperti siber dan terorisme internasional. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya melanjutkan kebijakan lama, tetapi juga berupaya memperkuat dan memperluas cakupan pertahanan nasional agar lebih responsif terhadap perubahan lingkungan strategis global dan regional (Setkab.go.id, 2025).

Salah satu langkah awal yang menonjol di masa kepemimpinan Prabowo adalah penguatan peran Dewan Pertahanan Nasional (DPN). DPN menjadi forum utama dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara untuk lima tahun ke depan. Prabowo menegaskan bahwa DPN harus mampu merancang kebijakan pertahanan yang tidak hanya reaktif terhadap ancaman saat ini, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi potensi ancaman

masa depan. Dalam sidang perdana DPN, ia menekankan pentingnya membangun postur pertahanan yang adaptif, fleksibel, dan berbasis pada analisis risiko jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan konvensional yang cenderung statis menuju pendekatan strategis yang lebih dinamis dan terintegrasi, di mana pertahanan nasional tidak hanya dilihat sebagai urusan militer, tetapi juga melibatkan seluruh komponen bangsa (Presidenri.go.id, 2025).

Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pertahanan era Prabowo. Modernisasi ini tidak hanya dimaknai sebagai pengadaan peralatan militer baru, tetapi juga meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem komando dan kontrol, serta integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan sistem pertahanan siber. Prabowo menyadari bahwa ancaman yang dihadapi Indonesia kini semakin kompleks, termasuk potensi konflik di Laut China Selatan, ketegangan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik, serta ancaman terorisme lintas negara. Oleh karena itu, modernisasi alutsista diarahkan untuk meningkatkan daya tangkal (*deterrence effect*) Indonesia, memperkuat kemampuan proyeksi kekuatan militer, dan memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai skenario kontingensi (RM.id, 2024).

Selain aspek militer, diplomasi pertahanan dan kerja sama internasional juga menjadi pilar penting dalam strategi pertahanan Prabowo. Pemerintah Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang berarti tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun, namun tetap aktif dalam menjaga stabilitas kawasan. Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat melalui latihan bersama, pertukaran informasi intelijen, serta partisipasi dalam operasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan (*confidence building measures*), mencegah eskalasi konflik, serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum internasional seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) (Detik.com, 2020).

Penguatan industri pertahanan nasional juga menjadi agenda strategis di era Prabowo. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dengan mendorong pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Prabowo mendorong kolaborasi antara BUMN pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia dengan mitra asing yang bersedia melakukan transfer teknologi. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, tetapi juga memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi teknologi. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun kemandirian pertahanan yang berkelanjutan dan tidak

mudah terpengaruh oleh embargo atau perubahan kebijakan luar negeri negara pemasok (Indonesiadefense.com, 2024).

Tantangan baru yang dihadapi Indonesia di bidang pertahanan adalah ancaman siber yang kian meningkat. Pemerintahan Prabowo menempatkan pengembangan sistem pertahanan siber sebagai prioritas utama. Hal ini dilakukan melalui pembentukan satuan siber di lingkungan TNI, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, serta kerja sama dengan institusi riset dan sektor swasta. Prabowo menyadari bahwa perang masa depan tidak hanya akan terjadi di darat, laut, dan udara, tetapi juga di dunia maya. Oleh karena itu, penguatan pertahanan siber menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional yang komprehensif, untuk melindungi infrastruktur vital negara dari serangan siber dan spionase digital (RM.id, 2024).

Kebijakan anggaran pertahanan juga mengalami perubahan signifikan di era Prabowo. Ia berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara bertahap, dengan proporsi yang lebih besar dialokasikan untuk modernisasi alutsista, penguatan postur militer di wilayah perbatasan, serta peningkatan kesejahteraan prajurit. Kebijakan ini didasarkan pada analisis kebutuhan riil di lapangan, serta benchmarking terhadap negara-negara tetangga yang telah lebih dulu melakukan modernisasi militer secara masif. Prabowo menilai bahwa tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya modernisasi dan penguatan pertahanan nasional tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mencari sumber pembiayaan inovatif, termasuk melalui kerja sama pembiayaan dengan negara mitra dan pemanfaatan skema offset dalam pengadaan alutsista (Setkab.go.id, 2025).

Konsep pertahanan rakyat semesta tetap menjadi landasan utama kebijakan pertahanan Indonesia di era Prabowo, namun dengan penyesuaian agar relevan dengan tantangan zaman. Pemerintah memperkuat komponen cadangan dan pendukung, serta memperluas program pelatihan bela negara bagi masyarakat sipil, pelajar, dan mahasiswa. Selain itu, konsep pertahanan non-militer juga diperkuat, termasuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, ancaman biologi, dan ancaman multidimensi lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip total defense, di mana seluruh elemen bangsa dilibatkan dalam upaya pertahanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung (Presidenri.go.id, 2025).

Implikasi Kemitraan Indonesia–Turki Terhadap Stabilitas Regional Dan Diplomasi Pertahanan

Kemitraan strategis antara Indonesia dan Turki dalam bidang pertahanan telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, menandai perubahan signifikan dalam lanskap keamanan regional Asia Tenggara. Kolaborasi ini dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 2010 yang menitikberatkan pada transfer teknologi dan produksi bersama alat utama sistem persenjataan (alutsista). Salah satu proyek unggulan dari kemitraan ini adalah pengembangan medium tank “Harimau” yang melibatkan PT Pindad dari Indonesia dan FNSS Savunma Sistemleri dari Turki. Dengan adanya transfer teknologi ini, Indonesia tidak hanya memperoleh akses terhadap teknologi militer mutakhir, tetapi juga meningkatkan kemampuan industri pertahanannya secara mandiri, sehingga memperkuat postur pertahanan nasional dan berkontribusi pada stabilitas kawasan, terutama dalam menghadapi dinamika keamanan di Laut China Selatan dan wilayah perbatasan lainnya ([Rasyid,2024](#)).

Dari sisi diplomasi pertahanan, kemitraan Indonesia–Turki telah memberikan dampak positif terhadap posisi tawar Indonesia di tingkat internasional. Melalui kolaborasi ini, Indonesia mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai negara yang tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen alutsista di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan kemampuan produksi nasional, khususnya dalam pembuatan kendaraan tempur modern, telah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor alutsista dari negara-negara Barat. Selain itu, kerja sama ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat produksi dan distribusi alutsista di kawasan ASEAN, memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi pertahanan regional, serta memperluas jejaring strategis dengan negara-negara lain yang juga tertarik mengadopsi teknologi Turki ([Prasetya & Setiawan, 2023](#)).

Implikasi kemitraan ini terhadap stabilitas regional juga tercermin dari peningkatan intensitas latihan militer bersama dan partisipasi dalam misi perdamaian internasional. Latihan gabungan antara Indonesia dan Turki, seperti yang dilaksanakan di Natuna pada tahun 2022, tidak hanya meningkatkan interoperabilitas antar angkatan bersenjata kedua negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan solidaritas di antara negara-negara kawasan. Selain itu, keterlibatan bersama dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan komitmen kedua negara dalam menjaga keamanan global, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam meredam potensi konflik di kawasan, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti konflik Laut China Selatan dan krisis kemanusiaan Rohingya. Namun demikian, kemitraan ini juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan kesenjangan teknologi dan kapasitas produksi yang masih harus diatasi oleh Indonesia. Meskipun telah terjadi peningkatan

kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan bersama, data menunjukkan bahwa sekitar 30% komponen tank hasil kerja sama masih diimpor dari Turki, menandakan adanya ketergantungan yang belum sepenuhnya teratasi. Selain itu, dinamika geopolitik global, seperti posisi Turki dalam konflik Suriah dan hubungannya dengan NATO, turut mempengaruhi keberlanjutan dan arah kerja sama ini. Tekanan dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Tenggara juga dapat menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi stabilitas kemitraan Indonesia–Turki di masa depan (akbar, 2024).

4. KESIMPULAN

Terpilihnya presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin Indonesia membawa reorientasi penting dalam kebijakan pertahanan nasional, yang ditandai dengan pendekatan strategis, pragmatis, dan berorientasi pada kemandirian pertahanan. Studi ini menunjukkan bahwa kemitraan militer Indonesia–Turki menjadi cerminan dari strategi diversifikasi alutsista dan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Melalui proyek-proyek seperti pengembangan drone, keterlibatan dalam jet tempur generasi kelima, serta kerja sama pengembangan kapal selam, Indonesia mulai memposisikan dirinya sebagai aktor pertahanan yang lebih otonom dan berdaya saing di kawasan.

Transformasi ini sekaligus menegaskan adanya kesinambungan dengan kebijakan era sebelumnya, namun dengan intensitas dan cakupan yang lebih luas dalam merespons ancaman keamanan multidimensi. Kemitraan dengan Turki memperlihatkan model kerja sama selatan-selatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam kerangka geopolitik regional dan global. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pertahanan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan secara nasional, namun juga berdampak terhadap konfigurasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya konsistensi kebijakan, peningkatan kapasitas absorpsi teknologi, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari kemitraan strategis yang dibangun.

DAFTAR REFERENSI

- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*.
- Athirah, N. (2025). From Diplomacy To Industry: Evaluating The Long-Term Impacts Of Indonesia–Türkiye Defense Cooperation On Regional Stability. *Journal Of Migration And Political Studies*, 3(1).
<https://Dergipark.Org.Tr/En/Pub/Mipos/Issue/91157/1637396>

- CNBC Indonesia. (2024). Prabowo ke Kabinet: Saya Bukan Bermaksud Membuat Anda Militeristik! <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241025163327-4-583115/prabowo-ke-kabinet-saya-bukan-bermaksud-membuat-anda-militeristik>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th Ed.). Sage Publications.
- Detik News. (2020, December 30). Catatan 7 Kebijakan Pertahanan Menhan Prabowo Subianto Sepanjang 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5314617/catatan-7-kebijakan-pertahanan-menhan-prabowo-subianto-sepanjang-2020>
- Detik.com. (2020). Catatan 7 Kebijakan Pertahanan Menhan Prabowo Subianto Sepanjang 2020. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-5314617/catatan-7-kebijakan-pertahanan-menhan-prabowo-subianto-sepanjang-2020>
- Friska Gori. (2024, November 6). Prabowo Subianto, dari Jejak Militer ke Kepemimpinan Nasional. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/friskagori6821/672b2345c925c4378079a8d2/prabowo-subianto-dari-jejak-militer-ke-kepemimpinan-nasional>
- Hardianto, M. K. B. (2021). *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia Sebagai Negara Maritim*. Jurnal Noken Ilmu Sosial.
- Hikam, M. A. S., & Praditya, Y. (2015). *Globalisasi dan Pemetaan Kekuatan Strategis Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Transnasional*. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara.
- Indonesiadefense.com. (2024). Pengamat Sarankan 4 Strategi untuk Pemerintahan Prabowo Terkait Masalah Keamanan di Kawasan. Diakses dari: <https://indonesiadefense.com/pengamat-sarankan-4-strategi-untuk-pemerintahan-prabowo-terkait-masalah-keamanan-di-kawasan/>
- Jurnal DGSJ UNJANI. (2023). Analisis Kerjasama Indonesia dan Turki dalam Bidang Industri Pertahanan. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/DGSJ/article/view/2860>
- Jurnal Diplomasi Pertahanan Indonesia-Turki. (2022). Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Turki sebagai Upaya Penguatan Industri Pertahanan Nasional. https://repository.unsri.ac.id/158950/20/RAMA_84201_07041182025011_0009026012_0013029402_01_front_ref.pdf
- Jurnal SociaLogica. (2023). Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Turki dalam Pengembangan Tank. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/JurnalSociaLogica/article/download/1222/1185/3634>
- Mardika, I. H. (2024, April 30). Prabowo, transformasi kepemimpinan, dan harapan masa depan. Detik.com. <https://news.detik.com/kolom/d-7598850/prabowo-transformasi-kepemimpinan-dan-harapan-masa-depan>
- Midhio, I. W., Yanuarti, I., & Wibisono, M. (2020). *Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik Untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia*. Strategi Perang Semesta.

- Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*.
- Presidenri.go.id. (2025). Pimpin Sidang Perdana DPN, Presiden Prabowo Tegaskan Pertahanan sebagai Fondasi Utama Negara. Diakses dari: <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pimpin-sidang-perdana-dpn-presiden-prabowo-tegaskan-pertahanan-sebagai-fondasi-utama-negara/>
- Repository Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2021). Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Turki Dalam Pengembangan Tank. <https://repository.umj.ac.id/17408/>
- RM.id. (2024). Pertahanan Indonesia Di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran: Memantapkan Alutsista Menghadapi Krisis Pertahanan Global. Diakses dari: <https://rm.id/baca-berita/kolom/235767/pertahanan-indonesia-di-era-pemerintahan-prabowogibran-memantapkan-alutsista-menghadapi-krisis-pertahanan-global>
- Robby, H.M.F., & Boran, T.K. (2024). Mapping The Potential Of The Strategic Partnerships Between Indonesia And Türkiye. *Insight Turkey*. <https://www.jstor.org/stable/48778426>
- Sekretariat Negara RI. (2025, February 7). Presiden Prabowo: Kekuatan Pertahanan Penting dalam Menjaga NKRI. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_kekuatan_pertahanan_penting_dalam_menjaga_nkri
- Setkab.go.id. (2025). Presiden Prabowo: Kekuatan Pertahanan Penting dalam Menjaga NKRI. Diakses dari: <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-kekuatan-pertahanan-penting-dalam-menjaga-nkri/>
- Sindonews. (2024, January 7). Soal Kebijakan Pertahanan Prabowo Subianto, Begini Kata Mantan Irjen Kemhan. <https://nasional.sindonews.com/read/1293537/12/soal-kebijakan-pertahanan-prabowo-subianto-begini-kata-mantan-irjen-kemhan-1704636105>
- Susetyo, D., & Sarjito, A. (2022). Analisis Penguatan Posisi Indonesia di Kancan Internasional Dalam Perspektif Manajemen Strategis. *Jurnal Nusantara*.
- Yilmaz, I., Bachtar, H., Smith, C., & Shakil, K. (2024). The Changing Populist Performances Of Prabowo Subianto: Indonesia's Incoming President. *Researchgate*. <https://www.researchgate.net/publication/379238020>